

BAB II
KOSOVO DAN DINAMIKA HUBUNGAN POLITIK KOSOVO
DALAM ISU KEDAULATAN

Bab ini merupakan penjabaran substansi mengenai gambaran profil dan sejarah Republik Kosovo yang merupakan objek pokok penelitian dalam skripsi ini, serta hubungan atau keterkaitannya dalam ranah politik dengan negara Yugoslavia dan Republik Serbia. Kosovo yang dianggap sebagai sebuah negara berdaulat pada era dewasa ini menuai berbagai respons dalam hubungan internasional, termasuk ketidak-jelasan status kedaulatan yang telah dicapai oleh Kosovo. Sementara syarat sah berdirinya negara sesuai dengan Konvensi Montevideo meliputi beberapa aspek, yakni: *pertama*, terdapatnya penduduk permanen yang mendiami wilayah tersebut; *kedua*, wilayah atau teritori yang jelas; *ketiga*, terciptanya pemerintahan yang berdaulat; dan *keempat*, memiliki kapasitas untuk membangun hubungan internasional dan menggalang pengakuan atau dukungan internasional dengan negara lain.¹ Namun permasalahan status kedaulatan Kosoo selalu berujung pada proses perundingan yang tidak mencapai kesepakatan berarti.

¹ Organization of American States, "Convention on Rights and Duties of States", diakses dari <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB; ditambahkan dengan buku: Hersch Lauterpacht, *Recognition in International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 419; ditambahkan dengan artikel: United Nations Treaty Centre, "UNTC: Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of America States", diakses dari <http://www.treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280166aef>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

Permasalahan kedaulatan menjadi isu yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara-bangsa dalam pergaulannya di lingkungan hubungan internasional pada abad ke-21. Ditelisik dengan menggunakan hasil Konvensi Montevideo, maka Kosovo sejatinya telah memenuhi tiga persyaratan utama dalam mendapatkan status sebagai sebuah negara yang berdaulat. *Pertama*, Kosovo telah memiliki penduduk atau rakyat permanen yang mendiami wilayah tersebut; *Kedua*, Kosovo telah memiliki garis demarkasi wilayah atau teritori yang jelas dengan Serbia aupun negara sebelumnya (Yugoslavia); dan *Ketiga*, Pemerintahan yang berdaulat oleh Kosovo. Namun, Kosovo terganjal dengan persyaratan yang keempat mengenai pengakuan internasional terhadap status kedaulatan Kosovo serta peliknya berbagai hubungan yang dijalin antara Kosovo dengan negara lain, memberikan dampak pada kedudukan kedaulatan Kosovo yang semakin tidak jelas. Republik Serbia sebagai negara induk dimana Kosovo diakui sebagai wilayah yuridiksi dan kedaulatannya, mengaku bahwa Kosovo tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara merdeka secara penuh sebagai sebuah negara-bangsa. Melainkan hal ini hanya mencerminkan bahwa Kosovo telah mendapatkan status otonomi wilayah yang lebih besar dan bukan berarti menjadi sebuah negara-bangsa yang merdeka.

Maka, dengan ini penulis memberikan paparan mengenai profil dan sejarah terbentuknya entitas Kosovo serta perkembangannya hingga sekarang. Penulis juga memberikan penjelasan umum mengenai bermulanya eskalasi konflik identitas dalam hal mencapai isu kedaulatan di kalangan masyarakat Kosovo, dimana dimulai sejak kemunduran pemerintahan Kerajaan Yugoslavia dan semakin masif

ketika bubarnya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia. Pemaparan beberapa informasi di atas bertujuan agar didapatkan informasi yang lebih komprehensif dan empiris mengenai objek penelitian.

Dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, penulis juga menambahkan ihwal dinamika sejarah hubungan politik yang terjadi antara Kosovo ketika menjadi bagian wilayah dalam Yugoslavia serta Kosovo dengan Republik Serbia, hingga muncul isu dilema legitimasi pemerintah Serbia atas wilayah Kosovo. Penulis juga menambahkan beberapa informasi mengenai proses sebuah entitas dalam menempuh status kemerdekaan yang berdaulat agar lebih mendalam dalam memahami fenomena dan kasus Kosovo.

A. Profil dan Sejarah Kosovo

Kosovo adalah sebuah wilayah terkurung daratan (*landlocked*) yang terletak di wilayah Eropa Tenggara (Balkan) dengan luas wilayah 10.887 kilometer persegi. Letak geografis wilayah Kosovo berada di dataran rendah yang berbatasan dengan beberapa pegunungan di sekelilingnya. Puncak tertinggi di wilayah Kosovo bernama Gjeravica atau Deravica yang berada pada ketinggian 2656 meter di atas permukaan air laut. Kosovo berbatasan langsung dengan Serbia di sisi utara dan timur (sepanjang 366 km), Macedonia di sebelah tenggara (sepanjang 160 km), Albania di sisi barat daya Kosovo (sepanjang 112 km), serta Montenegro di sisi barat (sepanjang

160 km). Populasi Kosovo pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.883.018 juta jiwa.²



Gambar 1 Kosovo dan wilayah administrasi
(Sumber Kosovo and International society, Alex J. Bellamy, Palgrave Macmillan, 2002)

Komposisi demografis penduduk wilayah Kosovo terdiri dari berbagai macam etnis yang dipengaruhi sejak masa lampau dengan konflik antar etnis yang turut serta terjadi sepanjang sejarahnya. Penduduk Kosovo didominasi oleh penduduk etnis Albania dengan jumlah 92,9%, diikuti oleh etnis Bosniak 1,6%, Serbs 1,5%, Turks 1,1%, Ashkali 0,9%, Mesir 0,7%, Gorani 0,6%, Roma 0,5%, dan kelompok etnis minoritas lainnya 0,2%.³ Pada era awal bubarnya Yugoslavia, jumlah populasi Kosovo telah

² Central Intelligence Agency, "The World Factbook Europe: Kosovo", diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

³ James Summers (Ed), *Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011), hlm. 3-4

mencapai 1,58 juta jiwa (1981), yang dimana 77,4% merupakan kelompok etnis Albania dan 13,2% adalah etnis Serbia dan 9,4% merupakan etnis minoritas lainnya.⁴

Sebagai kelompok mayoritas di wilayah Kosovo, masyarakat etnis Kosovo-Albania memiliki permasalahan mengenai identitas kebangsaan yang selalu dibayangi tekanan oleh etnis Kosovo-Serbia. Permasalahan tersebut dipicu dengan adanya legitimasi pemerintahan negara Serbia yang mendukung kedudukan etnis Kosovo-Serbia atas wilayah Kosovo. Di sisi lain, internal kelompok etnis Kosovo-Albania juga dihadapkan pada permasalahan mengenai identitas kelompok yang berdasarkan pada keragaman dialek bahasa Albania, yakni: kelompok Gheg, dan kelompok Tosk.⁵ Dengan demikian, tercatat bahwa di dalam internal masyarakat etnis Kosovo-Albania sendiri pun juga memiliki permasalahan yang kompleks.

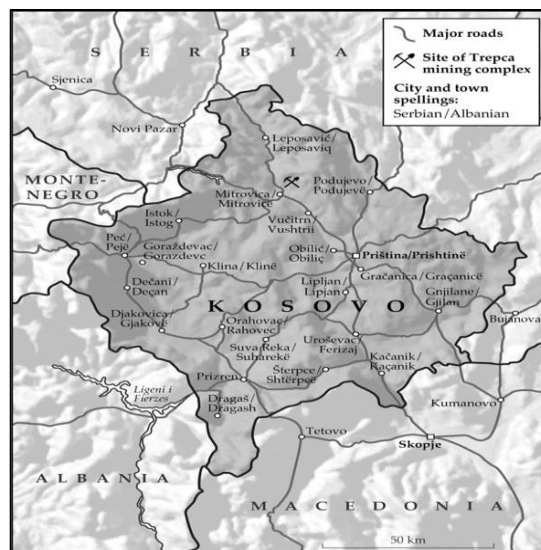
Kosovo memiliki ibu kota di Prishtina, yang terletak di bagian timur wilayah Kosovo. Secara geografis letak ibu kota berdekatan dengan wilayah dominasi etnis Kosovo-Serbia yang bermukim di wilayah Mitrovica. Dipilihnya Prishtina sebagai ibu kota bukan tidak ada alasan. Prishtina telah menjadi pusat peradaban, kebudayaan dan pemerintahan masyarakat di Kosovo sejak masa lalu. Bahkan kota ini sempat berkembang pesat ketika menjadi wilayah bagian dari kekaisaran Turki Ottoman. Sehingga Prishtina

⁴ Statistical Office of Kosovo, *Demographic Changes of the Kosovo Population 1948-2006* (Pristina: Statistical Office of Kosovo, 2008), hlm. 7

⁵ Stark Draper, *The Conceptualization of an Albanian Nation: Ethnic and Racial Studies Volume 20* (Newton: Department of History Stanford University, 1997), hlm. 125 dan 132

pantas dijadikan sebagai pusat administrasi Kosovo, yang dapat menjadi simbol persatuan antar kelompok masyarakat di wilayah tersebut.

Keanekaragaman hayati Kosovo tidak hanya pada konteks demografis saja, namun juga termasuk dalam kekayaan alam yang terkandung di bumi Kosovo. Komoditas Kosovo yang menjadi andalan antara lain: nikel, biji timah (*zinc*), magnesium, batu bara muda (*lignite*) dan komoditas tambang lainnya⁶. Hal ini menjadikan Kosovo merupakan negara yang mengandalkan hasil tambang kekayaan sumber daya alam dalam menjalankan perekonomian negara. Terbukti dengan dibentuknya kompleks pertambangan Trepca⁷ di dekat wilayah Mitrovica, sebuah bentuk komitmen otoritas Kosovo dalam mengembangkan industri pertambangan sebagai komoditas utama.



Gambar 2 Lokasi situs pertambangan Trepca
(Sumber Kosovo: What everyone needs to know, Tim Judah, Oxford University Press, 2008)

⁶ Central Intelligence Agency, *The World Factbook Europe: Kosovo*, diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

⁷ Howard Clark, *Civil Resistance in Kosovo* (London: Pluto Press, 2000), hlm. 66

Persebaran penduduk Kosovo dalam hal agama dan kepercayaan menunjukkan bahwa hampir 95,6% adalah pemeluk agama Islam, dimana hal ini dipengaruhi oleh keberadaan etnis Albania-Kosovo yang memeluk agama Islam sejak Kosovo menjadi wilayah dari kekaisaran Turki Ottoman. Selanjutnya diikuti oleh pemeluk agama Katolik Roma sebanyak 2,2% sebagai agama kedua terbesar di Kosovo dan Katolik Orthodox 0,07 % mengikuti pada posisi ketiga. Sementara 1,3% penduduk Kosovo menyatakan dirinya sebagai atheis serta sisanya tidak terafiliasi dengan agama ataupun kepercayaan apapun.⁸

Kosovo memiliki sejarah yang panjang dalam hal identitas etnis kebangsaan. Masyarakat Kosovo menganggap dirinya sebagai keturunan asli bangsa Illyria yang merupakan akar dari etnis Albania sekarang. Bangsa Illyria sejak masa lampau telah mendiami wilayah Albania dan Kosovo, yang lebih dikenal sebagai Dardania. Sehingga konsepsi penamaan wilayah Albania-Kosovo sebagai Dardania pernah dikemukakan kembali oleh Presiden Ibrahim Rugova. Namun, rakyat Kosovo menentang usulan tersebut karena berpendapat bahwa penamaan wilayah Kosovo menjadi Dardania bukan pilihan yang tepat apabila melihat keragaman etnis yang sudah berkembang di wilayah Kosovo sekarang.

Perkembangan keragaman etnis di wilayah Kosovo semakin meningkat sejak terjadinya penaklukan wilayah Balkan oleh kekaisaran

⁸ Central Intelligence Agency, "The World Factbook Europe: Kosovo", diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

Turki Ottoman pada tahun 1455. Jauh sebelum penaklukan terjadi, wilayah Kosovo justru dihuni oleh penduduk etnis Serbia yang merupakan rakyat dalam wilayah kerajaan Serbia kuno dan kekuasaan kekaisaran Austria-Hungaria. Keberadaan pemerintahan kekaisaran Turki Ottoman memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan demografis penduduk di wilayah Balkan, khususnya Kosovo. Dampak yang sangat signifikan yakni dilakukannya proses konversi agama terhadap penduduk lokal agar memeluk agama Islam. Hal ini menjadi titik awal berkembangnya eksistensi penduduk muslim Albania di wilayah Kosovo. Perkembangan tersebut justru memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan Kristen Ortodoks di wilayah Balkan, hingga etnis pemeluk Kristen Ortodoks (Serbia) menjadi terdesak ke wilayah utara.

Peristiwa migrasi besar⁹ dipicu oleh adanya keberhasilan perluasan wilayah dominasi kaum Kristen Serbia dan Albania di wilayah Eropa Tenggara. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan terjadinya perlawanan kaum Kristen terhadap Muslim Balkan sehingga penduduk muslim terdesak menuju arah Kosovo, Macedonia hingga ke kota Skopje¹⁰. Migrasi besar ini dimaknai sebagai proses bermulanya kemunduran legitimasi kekuasaan kekaisaran Turki Ottoman di wilayah Balkan, dan

⁹ Migrasi besar terjadi pada abad ke-16 (1683-1690) di wilayah Eropa Tenggara yang dipicu oleh kebangkitan kaum Kristen Ortodoks Serbia dan Albania yang berhasil mendesak mundur penduduk dominasi Muslim Albania yang bermukim di wilayah Eropa Tenggara. Peristiwa ini juga menandai mulai mundurnya legitimasi kekuasaan kekaisaran Turki Ottoman pada abad ke-16 dan abad ke-17 (Tim Judah, *Kosovo What Everyone Need to Know*, 2008 dan Harold W. V. Temperley, *History of Serbia*, 1917; dicetak kembali 1969, hlm. 128-129)

¹⁰ Skopje merupakan pusat administrasi pemerintahan sekaligus ibu kota negara Macedonia (FYRO)

munculnya pengakuan kedaulatan beragama oleh kekaisaran Turki Ottoman. Liga Prizren yang dibentuk pada tahun 1887 menjadi momentum berakhirnya konflik antar umat beragama di wilayah Balkan. Meskipun konflik agama telah selesai, permasalahan etnis atau kebangsaan di Balkan masih belum dapat terselesaikan.

Kekuasaan kekaisaran Turki Ottoman atas wilayah Balkan berakhir pada tahun 1922 dan terjadinya peristiwa penandatanganan perjanjian Sevres yang menandai berakhirnya pemerintahan khalifah Islam modern sejak tahun 1299. Keruntuhan kekaisaran Turki Ottoman ini memberikan dampak yang sangat besar dan memunculkan pertumpahan darah antar wilayah bekas kekaisaran. Berbagai tindakan revolusi guna mendirikan pemerintahan yang berdaulat muncul antar kelompok bangsa. Bahkan pertumpahan darah yang besar terjadi ketika revolusi perjuangan kemerdekaan rakyat Serbia, Bulgaria, Montenegro dan Yunani (Liga Balkan) yang menyatakan kemerdekaan setelah runtuhnya kekuasaan kekaisaran Turki Ottoman.

Runtuhnya kekaisaran Turki Ottoman menjadikan beberapa kelompok etnis bangsa berkeinginan untuk mendirikan sebuah negara yang menaungi entitas rakyatnya. Keinginan ini pertama kali dicetuskan oleh rakyat etnis Albania yang berkeinginan mendirikan negara sendiri untuk menyatukan seluruh rakyat Albania. Hal ini didukung oleh kekuatan negara besar pada masa itu yakni Italia dan Rusia, sementara Perancis menolak keberadaan usulan tersebut. Keberhasilan pembentukan negara Albania

pada tahun 1912, menjadikan wilayah Kosovo yang mayoritas dihuni oleh kaum etnis Albania justru masuk dan tergabung ke dalam wilayah kerajaan Yugoslavia.

Reformasi dan restrukturisasi kerajaan Yugoslavia turut serta memberikan torehan sejarah dalam perjalanan Kosovo. Sejak dibentuknya kerajaan Yugoslavia pada tahun 1918, Kosovo jatuh dalam kekuasaan etnis Serbia dan etnis Kosovo-Albania justru mendapatkan tekanan. Keberadaan etnis Turki dan Kosovo-Albania memilih untuk tetap menduduki wilayah Kosovo merupakan sebuah upaya untuk tetap mempertahankan wilayah kedua kelompok etnis tersebut. Namun, tekanan etnis Serbia yang lebih kuat kepada etnis Turki menjadikan proses asimilasi kebudayaan gagal. Sehingga etnis Turki memilih untuk kembali ke wilayah negara Turki dan meninggalkan etnis Kosovo-Albania di tanah Kosovo.

Pembentukan Yugoslavia kedua oleh Josip Broz Tito atau yang lebih dikenal sebagai Federasi Republik Sosialis Yugoslavia, menghasilkan statuta khusus untuk mengakui keberadaan etnis Kosovo-Albania. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan provinsi otonomi Kosovo dan Metohija (Kosmet), yang sekaligus menetapkan batas demarkasi (perbatasan wilayah) provinsi Kosovo dan Metohija. Dalam pandangan etnis Kosovo-Albania, kebijakan pemerintahan Tito tidak memberikan dampak berarti atas kehendak kedaulatan Kosovo pasca ditetapkannya menjadi provinsi otonomi. Selang beberapa tahun, usaha mendapatkan pengakuan atas yuridiksi Kosovo agar menjadi status negara bagian dalam federasi semakin

berkembang. Namun, pada akhirnya usaha rakyat Kosovo tersebut tetap tidak disetujui oleh Josip Broz Tito.

Ideologi Yugoslavia menetapkan bahwa kedudukan etnis Slavia sebagai pribumi Balkan adalah yang berhak mengklaim status sebagai negara bagian dalam federasi Yugoslavia. Rakyat Kosovo dianggap sebagai rakyat luar yang datang dan menetap di wilayah Kosovo sejak masa lampau. Kehendak untuk mendapatkan kedaulatan dalam level negara bagian tidak dapat dipenuhi karena melanggar konsepsi Yugoslavia yang ditetapkan oleh Tito. Dengan demikian, Kosovo dalam pandangan Tito ditetapkan sebagai etnis yang sejajar dengan etnis pendatang seperti Ruthenian, Yahudi, Roma, Hungaria, Slovakia dan Italia dan tidak berhak atas kedaulatan penuh apabila dikaitkan dengan kedudukan pendirian entitas dalam Yugoslavia.

Kemunduran kekuasaan Tito dalam Yugoslavia memberikan peluang besar bagi rakyat Kosovo dalam mendapatkan status yang lebih besar mengenai kedudukannya dalam federasi Yugoslavia. Sejak tahun 1963 kedudukan Kosovo berhasil mendapatkan pengakuan atas entitas Kosovo-Albania adalah bagian dari bangsa Slavia. Hal ini ditandai dengan pemberian status atas sektor politik, sektor pendidikan, sektor ekonomi dan simbol budaya tertentu yang dapat digunakan oleh rakyat Kosovo di tingkat federal.

Pemberian status otonomi yang lebih besar pada tahun 1963, menimbulkan gejolak tuntutan rakyat Kosovo agar segera diakui kedudukannya setara sebagai republik dalam federasi Yugoslavia pada

tahun 1968. Namun hingga tahun 1974, harapan Kosovo hanya dapat direalisasikan dengan perubahan status oleh pemerintah federal dari wilayah otonomi Kosovo menjadi provinsi otonomi Kosovo. Perubahan ini memberikan hasil kedudukan yang setara antara provinsi otonomi Kosovo dengan provinsi otonomi Vojvodina di dalam negara bagian Republik Serbia. Akibatnya, Kosovo dapat mendapatkan hak-hak khusus (*privileges*), termasuk mengadopsi konstitusi, undang-undang, dan tata peraturan serta pembentukan badan legislatif sendiri yang dapat terintegrasi ke dalam urusan dengan badan legislatif federal Yugoslavia.

Pengakuan pemerintah federal atas status provinsi otonomi Kosovo kembali menimbulkan permasalahan ketika mayoritas rakyat etnis Albania memulai demonstrasi di ibu kota Prishtina. Tahun 1981 gelombang demonstrasi terjadi di wilayah ibukota Kosovo yang dipicu oleh tuntutan rakyat Kosovo-Albania agar Kosovo menjadi republik dalam federasi Yugoslavia. Akibat dari peristiwa demonstrasi yang terjadi, muncullah stigma anti-Serbia di kalangan penduduk Kosovo terutama oleh kelompok etnis Kosovo-Albania. Hingga pada akhirnya banyak penduduk etnis Kosovo-Serbia memilih untuk meninggalkan wilayah Kosovo sebagai akibat dari muncul stigma anti-Serbia di Kosovo.

Peristiwa tersebut menimbulkan permasalahan lainnya. Gejala tuntutan rakyat etnis Serbia untuk melakukan referendum penghapusan status otonomi bagi Kosovo sebagai akibat dari stigma anti-Serbia yang oleh etnis Kosovo-Albania. Tuntutan etnis Serbia akhirnya berujung pada

keberhasilan dari pemerintah federal dengan dihapuskannya status provinsi otonomi bagi Kosovo pada tahun 1989. Akibatnya segala urusan Kosovo ditangani langsung oleh pemerintah pusat Republik Serbia. Bentuk otonomi yang sudah didapatkan oleh Kosovo sejak perjalanan dalam Yugoslavia pada akhirnya justru meninggalkan permasalahan dalam tuntutan kedaulatan itu sendiri. Permasalahan ini semakin berlanjut ketika pemerintahan Tito akhirnya mengalami kemunduran dan bermulanya keruntuhan Federasi Republik Sosialis Yugoslavia.

B. Perjalanan Konsep Yugoslavia Hingga Pecahnya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia

Yugoslavia menjadi istilah yang sangat dikenal dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di wilayah Balkan (Eropa Tenggara) sejak Perang Dunia Pertama. Sejatinya, istilah Yugoslavia berkembang dengan define konsep yang tidak spesifik. Yugoslavia merupakan sebuah konsep negara yang menaungi seluruh kelompok masyarakat etnis Slavia Selatan dan pertama kali dicetuskan oleh Raja Peter I Karađorđević. Konsep Yugoslavia tersebut meliputi seluruh daerah Balkan pada masa sekarang, antara lain: Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Macedonia (FYROM)¹¹, dan Montenegro.

¹¹ *Former Yugoslav Republic of Macedonia* (FYROM), atau dalam istilah pendek dikenal sebagai Macedonia (Republik) merupakan negara merdeka-berdaulat yang berada di Eropa Tenggara. Hal ini menjadi nama resmi negara Republik Macedonia dalam hubungan internasional, dikarenakan sejarah perselisihan penggunaan nama 'Macedonia' antara Republik Macedonia dengan Wilayah Macedonia di Yunani (Dimitar Bechev, *Historical Dictionary of the Republic of Macedonia* (*Historical Dictionaries of Europes*, 2009), hlm. 14)

Nama Yugoslavia berkembang secara masif pada abad ke-17 hingga abad ke-20, ditandai dengan runtuhnya kerajaan Austria-Hungaria pada tahun 1918 sebagai akibat dari berakhirnya Perang Dunia Pertama di wilayah Eropa. Konsep ini kemudian berkembang pesat sejak dibentuknya kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia pada 1 Desember 1918 melalui dekrit yang diumumkan oleh Raja Peter I. Selanjutnya nama Yugoslavia menguat dengan terjadinya peristiwa perubahan nama negara menjadi Kerajaan Yugoslavia oleh Raja Alexander I Karađorđević pada tanggal 3 Oktober 1929.



Gambar 3 Wilayah kedaulatan Yugoslavia saat pembentukan kerajaan tahun 1918-1920 (Sumber *A Short History of Yugoslavia*, ed., S. Clissold, Cambridge University Press, 1996)

Pembentukan pemerintahan monarki di wilayah Balkan atas deklarasi Raja Peter I, memunculkan konsep kebangsaan yang lebih besar dikalangan etnis Slavia Selatan mengenai identitas Yugoslavia. Raja Peter I

beranggapan bahwa pembentukan negara baru tersebut dilandasi dengan hak seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, yang didukung oleh Presiden Woodrow Wilson dan Kekuatan Entente (*Tripple Entente*)¹² pada waktu itu. Sehingga Yugoslavia didirikan atas dasar kehendak rakyat Serbia, Kroasia dan Slovenia serta beberapa etnis minoritas lainnya dalam menentukan masa depan dan urusan negaranya sendiri. Pembentukan Kerajaan Yugoslavia dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dengan berprinsip pada sistem konstitusional dan parlementer.

Sepanjang sejarah, Yugoslavia diketahui berdiri dalam dua kali masa pemerintahan, yakni Yugoslavia pertama yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Yugoslavia (sebelumnya bernama: kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia) dan Yugoslavia kedua yang ditandai dengan berdirinya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia. Kerajaan Yugoslavia yang didirikan oleh Raja Peter I, memiliki struktur pemerintahan monarki konstitusional dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh raja sementara fungsi legislatif dilimpahkan pada parlemen kerajaan. Pada awal pembentukan kerajaan Yugoslavia, rakyat Serbia, Kroasia dan Slovenia sepakat untuk menjadikan dasar ideologi berbangsa dengan menerapkan konsepsi Yugoslavia. Akibatnya, penghargaan atas keberadaan kaum etnis minoritas diakui kedudukannya oleh negara di bawah kuasa Raja Peter I.

¹² *Tripple Etente* (Kekuatan Etente) adalah sebuah poros kerjasama antar negara Inggris Raya (saat itu Imperium Britania), Perancis dan Kekaisaran Rusia guna membendung kekuasaan dan pengaruh *Tripple Alliance* (Aliansi Tiga) di benua Eropa (Robert Gildea, *Barricades and Borders: Europe 1800-1914*, 2003 dan Bernadotte Schmitt, *Tripple Alliance and Tripple Entente*, 1771)

Legitimasi kekuasaan kerajaan Yugoslavia mulai menurun ketika pada tahun 1929 Raja Alexander I melakukan tindakan kontroversial dengan menghapuskan konstitusi nasional, membubarkan parlemen, dan mendeklarasikan bermulanya kekuasaan absolut. Raja Alexander I juga melarang segala bentuk aktivitas partai politik yang memiliki keterkaitan dengan agama maupun etnis tertentu. Hal ini merupakan usaha Raja Alexander I yang ingin meraih cita-cita negara melalui penekanan kebijakan Yugoslavisme. Akibatnya, secara resmi nama negara dirubah menjadi kerajaan Yugoslavia dan wilayah administrasi kerajaan dirubah menjadi 9 wilayah *banates/banovinas*¹³, yang didasarkan pada wilayah historis di kawasan Balkan. Seluruh bendera nasional dan lambang resmi negara bagian dihapuskan serta dilarang di lingkungan kerajaan Yugoslavia.

Kediktatoran Raja Alexander I menghantarkan kepada perubahan tatanan struktural pemerintahan maupun masyarakat sosial di wilayah kerajaan Yugoslavia. Hal ini berakibat pada berubahnya proporsi anggota parlemen kerajaan yang turut memasukkan kelompok masyarakat minoritas. Pada tahun 1931 usaha parlemen memberikan rancangan konstitusi baru yang memberikan kekuasaan sah terhadap Raja Alexander I berhasil ditetapkan. Namun, sejumlah kontroversi muncul ketika kelompok oposisi menginginkan agar parlemen mendesak Raja Alexander I untuk

¹³ *Banates/Banovinas* merupakan istilah pembagian wilayah administrasi (sub-divisi) hasil dari penetapan wilayah dibawah kuasa Raja Alexander I pada tahun 1929 dan ditetapkan secara resmi dengan peristiwa adopsi Konstitusi Kerajaan Yugoslavia yang baru pada 3 September 1931. Batas wilayah Bonavina menjadi semakin bebas dan tidak terpengaruh atas wilayah antar etnis seperti pada pembagian wilayah sebelumnya.

mengembalikan pada konstitusi tahun 1918. Usaha ini gagal dan ditolak secara keras oleh Raja Alexander I.

Pada tanggal 9 Oktober 1934, Raja Alexander I secara tragis dibunuh oleh salah seorang anggota kelompok militan Utasa-Makedonia. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Alexander I sedang dalam perjalanan kunjungan kenegaraan ke Marseilles, Perancis guna memperkuat aliansi kekuatan Entente Kecil (*Little Entente*)¹⁴. Kejadian pembunuhan tersebut diduga mendapatkan dukungan dari rezim Benito Musolini dengan tujuan agar ambisi Musolini dalam mengembangkan wilayah kedaulatan Italia di Balkan semakin luas. Dugaan ini berkembang dikalangan masyarakat Yugoslavia dengan isu bahwa Musolini akan memberikan tekanan kepada kerajaan Yugoslavia supaya bubar dan legitimasi Italia menjadi semakin kuat di wilayah Eropa Selatan serta Eropa Tenggara. Pasca peristiwa pembunuhan Raja Alexander I, pemerintah menggelar pemilihan umum pertama pada tahun 1953 yang secara formal mengakhiri masa kediktatoran di Yugoslavia.

Legitimasi kerajaan Yugoslavia mulai memudar ketika stabilitas ekonomi dan politik di wilayah kerajaan tidak dapat terkendali. Kekuasaan yang secara terus-menerus berganti dalam kurun waktu singkat memberikan dampak yang sangat besar dalam keberlangsungan kerajaan Yugoslavia.

¹⁴ *Little Entente* atau Entente Kecil merupakan istilah kelompok kekuatan kecil aliansi militer pada pasca terjadinya perang dunia pertama di daratan Eropa. Kekuatan kecil ini didominasi oleh beberapa negara bekas kerajaan Austria-Hungaria dan kekaisaran Jerman, seperti: Ceko-slovakia, Rumania dan Yugoslavia (Carole Fink, Axel Frohn dan Jürgen Heideking, *Genoa, Rapallo and European Reconstruction in 1922*, 2002)

Keterpurukan ini semakin diperparah dengan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh Yugoslavia dalam usaha rehabilitasi infrastruktur negara. Sehingga defisit ekonomi dalam skala besar menuntut kuasa kerajaan untuk memberikan legitimasi dalam bentuk demokrasi kepada rakyatnya. Hal inilah bermulanya kuasa pemerintahan kerajaan beralih pada rakyat sipil.

Kemunculan sosok Josip Broz Tito dalam tampuk kekuasaan di Yugoslavia menerima persetujuan yang besar oleh rakyat Yugoslavia. Tito secara cepat melakukan usaha untuk stabilitasi perekonomian dan kondisi sosial masyarakatnya. Keinginan yang besar dari rakyat Yugoslavia diterima oleh Tito sebagai usaha untuk berdialog dengan pemerintah Kerajaan Yugoslavia. Hal ini ditunjukkan oleh Tito dalam memberikan nasihat kepada pemerintahan kerajaan agar segera memberikan daulat pemerintahan kepada rakyat sipil. Sehingga pada akhirnya Tito berhasil mengubah sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi bentuk republik federal dan menandai pemindahan kekuasaan tersebut. Pada era awal pemerintahan Tito, ia berhasil menata kembali struktur pemerintahan Yugoslavia dan menjadi pertanda masa berdirinya Yugoslavia kedua yang bernama Federasi Republik Sosialis Yugoslavia.



Gambar 4 Wilayah administrasi Federasi Republik Sosialis Yugoslavia
(Sumber Kosovo: What everyone needs to know, Tim Judah, Oxford University Press, 2008)

Naiknya Tito dalam kepemimpinan di Yugoslavia turut serta mengundang dukungan dari beberapa negara kekuatan besar pada waktu itu, diantaranya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kepemimpinan yang bersifat dinamis dan upayanya dalam menerapkan bentuk sosialisme di negeri Yugoslavia turut serta melenggangkan kekuasaan Tito atas Yugoslavia. Dukungan pemerintah Uni Soviet secara langsung diberikan oleh Joseph Stalin melalui Komitern Moscow pada tahun 1937 ketika Tito berhasil mendapatkan dukungan penuh sebagai sekretaris jenderal partai.¹⁵ Namun dukungan ini tidak berlangsung lama setelah Stalin mengetahui

¹⁵ Aleksandar Pavković, *The Fragmentation of Yugoslavia Nationalism and War in the Balkans* (London: Macmillan Press Ltd, 2000), hlm. 47

bahwa Tito memiliki perbedaan pemahaman terhadap sosialisme dengan Stalin. Sehingga, Tito mengubah manuver untuk menggalang dukungan dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1949 guna menyelamatkan kedaulatan Yugoslavia dari ancaman Uni Soviet.

Catatan sejarah membuktikan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap eksistensi Yugoslavia memang terjalin cukup erat. Namun, hal ini tidak menggoyahkan prinsip Tito untuk menolak ajakan bergabung dalam aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dibentuk kekuatan Barat. Tito menyadari bahwa kekuatan Barat dan Timur justru akan mengancam eksistensi Yugoslavia dan perdamaian dunia. Sehingga, Tito memilih untuk mulai meredam hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan memilih netral dalam melakukan diplomasi terhadap dua negara tersebut.

Di bawah kekuasaan Tito, kemunduran kerajaan Yugoslavia berhasil dipersatukan kembali dalam bentuk republik federasi sosialis. Konstitusi baru tahun 1946 berhasil diadopsi dalam upaya membangkitkan kembali konsep Yugoslavia di bawah pemerintahan Tito. Dalam konstitusi yang baru memuat substansi dalam mengatur beberapa aspek bernegara seperti bentuk negara federal dan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif.¹⁶ Sebanyak enam republik berhasil ditetapkan dalam konstitusi baru, yakni: Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina,

¹⁶ Kate Hudson, *Breaking the South Slav Dream the Rise and Fall of Yugoslavia* (London: Pluto Press, 2003), hlm. 40-42

Macedonia, dan Montenegro. Lembaga legislatif era Tito memiliki ciri dua kamar (*bicameral*), yakni terdiri dari Dewan Federal dan Dewan Bangsa. Sementara, kekuasaan eksekutif diatur secara demokrasi atas nama pemerintahan rakyat. Inilah bentuk demokrasi yang dipahami oleh Tito sebagai perwujudan dalam mencapai cita-cita negara bersama dengan rakyat Yugoslavia.

Perkembangan keberlangsungan negara federasi republik sosialis tersebut mengalami pasang surut dalam hal stabilitas ekonomi. Periode tahun 1945 dan tahun 1990 merupakan masa resesi tertinggi bagi Yugoslavia. Namun, pada periode tahun 1946 hingga 1966 merupakan masa keemasan Yugoslavia. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan perekonomian yang pesat dan kesejahteraan rakyat meningkat.¹⁷ Hasil optimal dapat dicapai oleh wilayah Slovenia dan Kroasia dalam mengembangkan industri dan perekonomiannya. Hal inilah yang kemudian memicu pendapat rakyat di kedua negara bagian tersebut mengenai kekuasaan yang lebih luas.

Desentralisasi yang diajukan oleh rakyat Slovenia dan Kroasia kepada pemerintah pusat secara resmi ditolak keras oleh wakil presiden Aleksander Ranković pada tahun 1966. Ranković berpendapat bahwa usaha desentralisasi akan memicu perpecahan kesatuan dan keutuhan negara, sekaligus memunculkan usaha separatisme dikalangan anggota federasi

¹⁷ Kate Transchel, *The Break Up of Yugoslavia Conflict in the Balkans* (New York: Chelsea House Publishers, 2007), hlm. 101

negara. Peristiwa penolakan oleh wakil presiden Ranković menghasilkan gelombang demonstrasi besar yang menuntut agar Ranković mundur dari tampuk kekuasaan wakil presiden. Akibat dari kejadian tersebut, Tito sangat berhati-hati dalam mengurus urusan dalam negeri terutama yang menyangkut pada keutuhan negara Yugoslavia.

Tahun 1967, kelompok kaum intelektual etnis Kroasia melakukan usaha ‘pemurnian’ terhadap identitas Kroasia dari pengaruh etnis Serbia. Hal ini diwujudkan dengan penghapusan segala bentuk serapan kata bahasa Serbia yang diadopsi ke dalam bahasa Kroasia. Peristiwa ini juga menyulut usaha kelompok ekstrimis Kroasia dalam membentuk gerakan nasionalisme yang menuntut kemerdekaan Kroasia dari Yugoslavia. Inilah yang menjadi tantangan pertama bagi pemerintahan Tito dalam menjaga keutuhan negara Yugoslavia dibawah kuasanya.

Gerakan kaum intelektual Kroasia tersebut akhirnya mendapatkan tanggapan dari Tito. Pada bulan Juli 1971 melalui bantuan partai Liga Komunis Yugoslavia, Tito melakukan pembasmian, penangkapan dan pemenjaraan terhadap ribuan kaum intelektual Kroasia.¹⁸ Tindakan Tito dalam menekan keberadaan gerakan nasionalisme Kroasia justru memicu kelompok etnis lain yang juga melakukan usaha gerakan nasionalisme bangsanya. Kelompok etnis Kosovo-Albania dan Bosnia yang melakukan gerakan separatis pada tahun 1979 mendapat respons cepat oleh Tito dengan memenjarakan sejumlah aktivis kedua etnis tersebut. Gejolak politik ini

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 102

tidak kunjung berakhir pada stabilitasi dan perdamaian. Hal ini diperpuruk dengan peristiwa wafatnya presiden Josip Broz Tito pada tanggal 4 Mei 1980.

Wafatnya Tito meninggalkan dilema suksesor kekuasaan kepemimpinan di Yugoslavia. Pada dasarnya konstitusi federal memuat sistematika pemilihan presiden suksesor apabila Tito mangkat. Namun, tidak ada satu pun dari delapan anggota dewan kepresidenan Yugoslavia yang bersedia memimpin negara federasi sosialis ini. Kekosongan kursi presiden Yugoslavia serta tidak adanya tokoh yang dapat melakukan stabilitasi politik dalam negeri, menjadikan negara ini rentan terhadap isu perpecahan federasi. Usaha stabilitas ekonomi dicoba oleh delapan anggota dewan kepresidenan Yugoslavia dengan tujuan agar stabilitas politik juga turut serta dapat dicapai. Namun, usaha tersebut gagal dan justru menimbulkan stigma yang besar antar kalangan negara bagian anggota federasi untuk meningkatkan keamanan perbatasan negara bagian masing-masing.

Tawaran bantuan ekonomi oleh negara Barat pada tahun 1970 diterima dengan baik oleh pemerintah Yugoslavia pada saat itu. Bantuan peminjaman uang dengan bunga rendah memicu skala pinjaman yang melonjak drastis. Harapan perbaikan ekonomi Yugoslavia urung dapat dicapai namun justru meningkatkan rasio utang negara hingga 400 persen pada tahun 1980 sebagai akibat dari kesalahan alokasi dan penggunaan uang bantuan pinjaman. Hal ini memicu kenaikan inflasi tinggi negara pada tahun

1988 hingga 1990 dan sentimen negara anggota federasi untuk menuntut kesejahteraan rakyat.

Tokoh utama pemimpin partai Komunis Serbia, Slobodan Milošević menggunakan masa krisis sebagai usaha dalam melancarkan gerakan nasionalisme Serbia pada tahun 1986. Milošević mengumumkan tiga prioritas kebijakan yang akan dilakukannya, yakni: pertama, meningkatkan amandemen konstitusi untuk meningkatkan control Serbia atas wilayah provinsinya; kedua, memperingatkan Slovenia dan Kroasia agar tidak melakukan tindakan yang dapat memecah persatuan Yugoslavia; dan ketiga, meningkatkan teror bahwa bangsa Kroasia dan Bosnia akan hidup dalam kesengsaraan apabila tidak tunduk kepada Serbia.

Tahun 1989 menjadi momentum bersejarah ketika Milošević berhasil mengadopsi konstitusi amandemen negara Yugoslavia yang menghilangkan hak otonomi wilayah Kosovo dan mengalihkan Kosovo ke dalam Serbia. Hal ini memicu demonstrasi di wilayah Kosovo dan menghasilkan perang saudara berdarah pada kurun waktu 1989-1990. Akhir tahun 1990 kelompok ekstrimis memulai usaha untuk memecah persatuan Yugoslavia. Usaha ini dilakukan oleh kaum Kosovo-Albania bersama dengan Kroasia dan Slovenia dalam memperjuangkan kedaulatan wilayahnya. Sehingga, pemerintahan Milošević memberikan ancaman akan usaha Slovenia dan Kroasia dalam rencana melakukan tindakan deklarasi kemerdekaan dari Yugoslavia.

Kondisi dalam negeri Kroasia semakin tidak stabil dengan adanya teror dan ultimatum yang dilakukan oleh pemerintah Serbia dibawah kuasa Milošević. Sejumlah kelompok nasionalis Kroasia melakukan penahanan terhadap etnis Serbia sebagai bentuk upaya dalam melakukan konfrontasi terhadap pemerintah Serbia. Hal ini semakin diperparah dengan munculnya tindakan deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Slovenia pada tahun 1991. Pasca dua peristiwa tersebut, pemerintah Serbia secara agresif melakukan serangan terhadap teritori Kroasia dan Slovenia hingga menyebabkan banyak korban sipil. Buntut dari serangan brutal Serbia ke wilayah Kroasia dan Slovenia, pada tahun 1991 Kroasia juga melakukan deklarasi kemerdekaan atas Yugoslavia. Kurun waktu tahun 1991 menjadi penanda lepasnya republik Kroasia dan republik Slovenia dari wilayah federasi Yugoslavia.

Peristiwa deklarasi kemerdekaan oleh Kroasia dan Slovenia pada tahun 1991 memberikan dampak yang besar terhadap gejolak politik di Yugoslavia. Pemerintah Serbia secara masif mengirimkan beberapa pasukan ke wilayah Kroasia dan Slovenia yang bertujuan untuk melakukan teror terhadap dua kelompok etnis Kroasia dan Slovenia. Hal inilah yang memicu teror genosida berdarah pertama di wilayah Balkan pasca terjadinya Perang Dunia Kedua dibawah Milošević. Peristiwa perang ini telah dicoba untuk diredakan oleh organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dibawah wakil khusus (*envoy*) Cyrus Vance, yang kemudian menghasilkan

kesepakatan Rencana Vance (*Vance Plan*) pada tahun 1991¹⁹. Namun hasil kesepakatan tersebut tidak berpengaruh terhadap konflik antara Serbia dengan Kroasia dan Slovenia.

Disintegrasi Yugoslavia semakin diperparah dengan adanya tindakan etnis Bosnia dalam melakukan gerakan nasionalismenya pada tahun 1992. Milošević memperingatkan kaum etnis Bosnia agar tidak melakukan deklarasi kemerdekaan dan lepas dari Yugoslavia. Ultimatum Milošević diperkuat dengan pernyataan ancaman apabila tindakan separatisme Bosnia dilakukan, maka Serbia akan melakukan perlawanan sipil terhadap etnis Bosnia. Peristiwa genting tersebut memicu pengiriman pasukan Serbia ke wilayah Bosnia. Hingga pada akhirnya tindakan genosida juga dilakukan Serbia kepada etnis Bosnia. Peristiwa genosida tersebut merupakan tindakan paling tidak manusiawi di bawah pemerintahan Milošević. Tujuan Milošević dalam melakukan tindakan tekanan adalah sebuah upaya agar Yugoslavia tetap bertahan dengan dominasi pemerintahan Serbia.

Intervensi dunia internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO menjadi pertanda kemunduran eksistensi Yugoslavia. PBB mengupayakan agar perdamaian dapat dicapai diantara negara yang

¹⁹ Rencana Vance (*Vance Plan*) merupakan kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Serbia dibawah Milošević dengan kelompok pejuang kemerdekaan Kroasia dan Slovenia. Kesepakatan ini terdiri dari dua persetujuan, yakni: pertama, *Geneva Accord* yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Yugoslavia Veljko Kadijević residen Serbia Slobodan Milošević dan Presiden Kroasia Franjo Tuđman di kota Jenewa pada tanggal 23 November 1991; kedua, *Sarajevo Agreement* yang ditandatangani pada 02 Januari 1992, muncul akibat adanya ingkar kesepakatan mengenai gencatan senjata dalam *Geneva Accord*. (Judith Armatta, *Twilight of Impunity: The War Crimes Trial of Slobodan Milosevic*, 2010 dan Geet-Hinrich Ahrens, *Diplomacy on the Edge: Containment of Ethnic Conflict and the Minorities Working Group of the Conferences on Yugoslavia*, 2007)

tergabung dalam federasi Yugoslavia serta penghentian peperangan yang mengakibatkan kerugian sosial terhadap beberapa kelompok etnis. Pada November 1995, intervensi serangan udara NATO dilancarkan terhadap pasukan Serbia di kota Sarajevo. Hal ini berhasil memukul mundur pasukan Serbia agar meninggalkan wilayah Bosnia-Herzegovina. Peristiwa ini juga menghasilkan Kesepakatan Damai Dayton²⁰ pada bulan November 1995 dan berhasil ditandatangani pada 14 Desember 1995 antara Serbia dan NATO. Persetujuan ini memberikan legitimasi yang sah terhadap pasukan NATO untuk masuk ke wilayah Bosnia dan memberikan jaminan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Pasca kekalahan Serbia dalam perundingan Dayton, Serbia justru mulai mengubah manuver untuk menguasai secara penuh wilayah Kosovo. Penguasaan dengan persenjataan dilakukan oleh pemerintah Serbia terhadap Kosovo. Peristiwa ini mengakibatkan mulainya perang Kosovo pada tahun 1999. Munculnya gerakan pasukan gerilya Kosovo yang berupaya untuk mempertahankan usaha separatisme dan kemerdekaan Kosovo atas Serbia semakin meningkat. Peristiwa naiknya isu kemerdekaan di Kosovo turut serta memicu keterlibatan pasukan NATO untuk melakukan intervensi militer di wilayah tersebut. Pada tanggal 24 Maret 1999, NATO

²⁰ Kesepakatan Damai Dayton (*General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina*) merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menghentikan perang Bosnia yang merupakan salah satu perang Yugoslavia. Kesepakatan ini memberikan legitimasi terhadap Republik Bosnia dan Herzegovina sekaligus pasukan NATO dalam mengamankan wilayah Bosnia dan Balkan. (*Fiftieth Session Agenda item 28 UN General Assembly and Fiftieth year UN Security Council A/50/79C S/199/999*)

mulai melakukan penyerangan terhadap perkemahan pasukan Serbia di wilayah Kosovo dan berhasil memukul mundur pasukan tersebut.

Kebijakan Milošević dalam melakukan tindakan agresif terhadap Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Kosovo merupakan faktor yang memicu pecahnya Yugoslavia. Upaya Milošević dalam mempertahankan Yugoslavia dianggap salah, karena justru memberikan superioritas kepada etnis Serbia. Akhirnya peristiwa penyerangan NATO di Kosovo yang berhasil memukul mundur pasukan Serbia menandai kemunduran legitimasi Milošević atas Yugoslavia. Tanggal 05 Oktober 2000, gelombang masa melakukan demonstrasi agar Milošević mundur dari kekuasaan pemerintahan Serbia dan Yugoslavia. Pada bulan Februari 2002, Milošević dikenakan sanksi persidangan atas kejahatan perang dan tindakan genosida yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Namun, sebelum persidangan yang direncanakan dimulai pada tahun 2006 Milošević justru wafat karena serangan jantung pada Maret 2002.

Kematian Milošević menandai secara resmi berakhirnya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia. Dewan legislatif Yugoslavia memberikan hak melepaskan diri (merdeka) kepada negara bagian bekas federasi tersebut. Hilangnya tapal batas yang menandai wilayah kedaulatan anggota federasi, memberikan dampak pada penetapan batas wilayah oleh negara bagian masing-masing di wilayah bekas federasi. Pada akhirnya Macedonia mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 25 September 1991 sementara Bosnia mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 01 Maret 1992. Setelah

Kroasia, Slovenia, Macedonia dan Bosnia berhasil mendapatkan status kemerdekaan secara penuh dari Yugoslavia, maka secara resmi pada tanggal 27 April 1992 konstitusi Yugoslavia secara resmi dihapuskan dan menandai berakhirnya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia..

C. Hubungan Politik Kosovo dalam Yugoslavia

Hubungan politik yang terjalin antara kedua otoritas pemerintahan sudah terjadi sejak pembentukan kerajaan Yugoslavia oleh Raja Peter I Karađorđević. Ikatan hubungan politik yang terjalin antar kedua otoritas membuktikan beberapa hal yang pelik. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa hubungan antar Kosovo dan Yugoslavia selalu berujung pada pertentangan dan perbedaan pendapat, khususnya dalam memberikan hak otonomi wilayah Kosovo. Namun pada akhirnya, Kosovo secara intensif tetap mendukung keberadaan Yugoslavia sebagai konsep induk berbangsa dalam rumpun bangsa Slavia Selatan.

Dukungan masyarakat etnis Kosovo-Albania terhadap pemerintahan di bawah Raja Peter I untuk membentuk sebuah negara berdaulat bagi etnis Slavia Selatan cukup besar. Namun, lambat laun dukungan ini melemah ketika Raja Alexander I menggunakan kuasanya untuk menerapkan pemerintahan absolut di kerajaan Yugoslavia. Kediktatoran Raja Alexander I berimbas pada kelompok etnis minoritas dalam kerajaan Yugoslavia tidak mendapatkan hak sosial secara penuh dalam bernegara. Peristiwa ini juga memicu Kosovo untuk mulai membelot kepada pemerintah pusat kerajaan

Yugoslavia. Terbunuhnya Raja Alexander I menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa Kosovo dalam memperjuangkan kedaulatannya.

Berakhirnya era Yugoslavia pertama yang ditandai dengan keruntuhan kerajaan Yugoslavia, maka harapan baru muncul bagi etnis Kosovo-Albania dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan. Naiknya kekuasaan Josip Broz Tito dan bermulanya era pemerintahan Yugoslavia kedua membuka momentum perubahan bagi bangsa Slavia Selatan. Pemerintahan Federasi Republik Sosialis Yugoslavia memberikan pengakuan kedudukan kepada kelompok etnis minoritas dalam negara. Keberadaan etnis minoritas tersebut menjadi perhatian bagi Tito dengan tujuan agar stabilitas politik era pemerintahannya selalu terjaga. Sehingga, pilihan untuk membentuk sub-divisi dalam negara menjadi 6 negara bagian (republik) dan 2 wilayah otonomi khusus (provinsi) dilakukan dalam pemerintahan Tito sesuai dengan konstitusi negara tahun 1974.

Demarkasi pembagian wilayah oleh Tito justru memberikan pertentangan antara kelompok etnis mayoritas dan kelompok etnis minoritas di Yugoslavia. Beberapa wilayah yang mengalami imbas dari pembagian demarkasi ini antara lain Serbia dan Bosnia. Dibawah pemerintahan Tito, Serbia dibagi menjadi tiga wilayah yakni: Republik Serbia sebagai negara induk yang di dalamnya terdapat dua wilayah otonomi khusus yaitu Kosovo dan Vojvodina. Sementara, pemerintahan Tito di Bosnia memberikan kekuasaan otonomi khusus terhadap wilayah konsentrasi etnis Serbia-

Bosnia di wilayah Srpska. Akibat kebijakan Tito tersebut justru menyisakan masalah status entitas dalam hal kedaulatan yang semakin tidak jelas.

Pembagian wilayah yang dilakukan oleh Josip Broz Tito justru dianggap oleh kelompok militan Kosovo sebagai upaya pemerintah pusat untuk menyatukan kembali kedaulatan politik Kosovo ke dalam Serbia. Hal ini turut menciderai usaha yang telah dilakukan kaum etnis Kosovo-Albania dalam memperjuangkan kedaulatannya sejak kerajaan Yugoslavia didirikan. Masyarakat Kosovo berpendapat bahwa kehendak Kosovo untuk berdaulat justru akan semakin ditekan dengan penggabungan wilayah Kosovo ke dalam Serbia. Dengan demikian, pembentukan wilayah otonomi Kosovo yang terintegrasi ke dalam wilayah negara bagian Serbia mulai menimbulkan masalah internal.

Permasalahan status wilayah otonomi bagi Kosovo lambat laun berimbas pada sektor ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan. Sejak dibentuknya pemerintahan Yugoslavia kedua, Tito berupaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk etnis Kosovo-Albania agar tidak berimbas pada hegemoni etnis Kosovo-Serbia di wilayah tersebut. Namun, upaya ini gagal dan semakin diperparah dengan keadaan laju pertumbuhan ekonomi wilayah Kosovo yang menurun. Bahkan hingga tahun 1986 hampir 55% dari jumlah angkatan kerja di Kosovo adalah pengangguran.

Konsiderasi ekonomi yang tidak stabil memberikan dampak terhadap uji coba kebijakan politik pada wilayah otonomi Kosovo. Rencana lima

tahunan yang dicanangkan oleh Josep Broz Tito tidak dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perbaikan sektor ekonomi di Kosovo. Sehingga banyak dari penduduk Kosovo yang mulai melakukan demonstrasi di wilayah ibu kota Prishtina. Akibatnya, demonstrasi pertama yang dipelopori oleh etnis Kosovo-Albania terjadi tahun 1968, dan terjadi kembali pada tahun 1981. Demonstrasi ini dilakukan atas dasar tuntutan rakyat Kosovo agar status negara ditingkatkan menjadi setara dengan republik di dalam federasi. Hal ini diharapkan agar Kosovo dapat menanggulangi permasalahan ekonomi dengan cara sendiri.

Gejolak politik yang terjadi di dalam negeri Kosovo, mulai memicu isu kedaulatan Kosovo yang akan diangkat di tingkat kongres Partai Komunis Yugoslavia. Tuntutan rakyat Kosovo semakin memuncak ketika kehendak rakyat Kosovo agar segera mendapatkan hak untuk keluar dari Yugoslavia dan menggabungkan diri dengan negara Albania. Namun hal ini secara tingkat federal ditolak, agar tidak terjadi perpecahan dalam pemerintahan negara Yugoslavia. Keadaan politik yang tidak stabil menuntut kelompok etnis Serbia dan Montenegro meninggalkan wilayah di Kosovo. Sehingga dominasi kelompok etnis Kosovo-Albania semakin besar di wilayah Kosovo.

Pada tahun 1985 hingga tahun 1986, muncul inisiatif rakyat Kosovo-Albania untuk melakukan petisi terhadap pemerintah federal mengenai transfer kekuasaan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Serbia di tingkat pemerintahan Yugoslavia. Hal ini ditanggapi secara serius oleh

Slobodan Milošević dengan mengeluarkan peraturan untuk menghapuskan status politik otonomi yang legal di wilayah Kosovo sebagai provinsi bagian dari Serbia. Milošević kemudian juga melakukan tindakan pengangkatan terhadap beberapa tokoh politik Kosovo-Albania yang mendukung konsep unifikasi legitimasi kekuasaan Serbia atas Kosovo²¹. Sehingga pertentangan rakyat mayoritas semakin meningkat di wilayah Kosovo.

Gelombang protes semakin besar terjadi menyusul ditetapkannya peraturan oleh Slobodan Milošević mengenai penghapusan status politik otonomi yang legal di Kosovo, sekaligus dilengserkannya beberapa pejabat Kosovo-Albania yang tidak sejalan dengan prinsip Milošević pada November 1988. Demonstrasi semakin membesar ketika beberapa kelompok muncul dalam kurun waktu tahun 1989 hingga tahun 1990 menyusul gejolak politik di Kosovo akibat peraturan Milošević. Petinggi politik Partai Komunis Kosovo yang dilengserkan oleh Milošević kemudian mengatur beberapa strategi untuk melakukan demonstrasi secara besar-besaran di wilayah ibu kota Prishtina. Demonstrasi ini bertujuan untuk mendapatkan kembali status politik Kosovo yang legal atas wilayah otonominya sekaligus melindungi hak-hak sipil kaum etnis Kosovo-Albania yang merasa ditekan oleh pemerintahan Milošević pasca ditetapkannya peraturan sepihak tahun 1986.²²

²¹ Aleksandar Pavković, *The Fragmentation of Yugoslavia Nationalism and War in the Balkans* (London: Macmillan Press Ltd, 2000), hlm. 186-187

²² *Ibid.*, hlm. 187

Kemunculan Liga Demokrasi Kosovo (LDK) tahun 1989 yang dipelopori oleh Dr. Ibrahim Rugova merupakan akibat dari tindakan pemerintah Serbia yang otoriter di Kosovo. Liga ini bertujuan memperkokoh dan mendukung kedaulatan Kosovo hingga mendapatkan status kemerdekaan seperti Slovenia dan Kroasia yang terlepas dari Yugoslavia. Namun upaya politik yang digalakkan oleh Liga Demokrasi Kosovo berujung pada peristiwa pengambilan keputusan kedaulatan Republik Kosovo di Parlemen Kosovo dari wilayah Serbia (bukan dari Yugoslavia) pada tanggal 2 Juli 1990.²³ Sehingga, status kemerdekaan dapat diraih Kosovo untuk pertama kalinya pada 21 September 1991²⁴, walaupun pada akhirnya secara internasional tidak mendapatkan dukungan yang berarti terhadap republik baru ini dan dianggap ilegal.²⁵

Kemenangan deklarasi kemerdekaan pertama oleh Liga Demokrasi Kosovo menandai berdaulatnya urusan pemerintahan lokal dan kepolisian di wilayah Kosovo. Hal ini bukan berarti bahwa deklarasi kemerdekaan yang dilakukan dapat memicu kedaulatan penuh Kosovo sebagai sebuah negara dalam hubungan internasional. Tahun 1995, Dr. Ibrahim Rugova dan jajaran anggota pemerintahannya diakui secara resmi sebagai delegasi pemerintah negara Kosovo yang berasal dari kelompok etnis masyarakat

²³ Tim Judah, *Kosovo: What Everyone Needs to Know* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 69

²⁴ *Ibid.*, hlm. 69

²⁵ Hanya Republik Albania yang memberikan status pengakuan atas kedaulatan Republik Kosovo pada peristiwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 1990; ditambahkan dengan buku: Tim Judah, *Kosovo: What Everyone Needs to Know* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 69

Kosovo-Albania dalam berbagai perundingan internasional. Hal ini sebagai buntut dari upaya Kosovo yang mencoba untuk menjadi negara berdaulat lepas dari kekuasaan otoritarian Milošević atas otonomi Kosovo dalam Serbia maupun Yugoslavia.

Tanggapan dingin dilontarkan oleh pemerintah pusat Beograd dalam memberikan isu perkembangan negosiasi antar pemerintah Yugoslavia dengan Kosovo. Pemerintah Yugoslavia yang berada dalam kekuasaan Milošević, berupaya untuk tetap menetapkan peraturan yang telah diraih dalam upaya penghapusan otonomi khusus bagi wilayah Kosovo. Sehingga, kelompok etnis Serbia-Kosovo juga dapat memperoleh kedudukan dalam pemerintahan lokal dan tidak terasingkan. Namun, upaya ini selalu mendapatkan kecaman dari etnis mayoritas Kosovo-Albania dalam membentuk pemerintahan yang berdaulat bagi Kosovo dan lepas dari pengaruh kekuasaan Yugoslavia.

Hubungan yang terjalin antara kedua otoritas sejatinya mengacu pada perbedaan pendapat mengenai pengakuan status kedaulatan dan otonomi atas wilayah Kosovo. Melalui Liga Demokrasi Kosovo, etnis Kosovo-Albania yang dipimpin oleh Dr Ibrahim Rugova terus berupaya untuk mengembalikan status otonomi wilayah Kosovo yang dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah federal Yugoslavia dibawah kuasa Milošević. Sementara disisi lain, upaya alternatif yang hendak dijalankan oleh pemerintah federal dalam kasus Kosovo adalah untuk tetap mengupayakan integrase Kosovo dalam kedaulatan Serbia, khususnya tetap

menjadi wilayah legitimasi dalam ranah pemerintahan Yugoslavia dibawah Milošević.

Pertentangan mulai muncul seiring dengan tindakan keras Liga Demokrasi Kosovo yang terus mengupayakan kedaulatan melalui keberhasilan voting Parlemen Kosovo mengenai kemerdekaan Kosovo tahun 1990 dan 1991. Namun, hal ini pada akhirnya berujung pada peperangan yang terjadi dengan dipimpin oleh Milošević sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintahan lokal di Kosovo. Sekaligus menghentikan gejolak politik yang terjadi di dalam internal Kosovo mengenai isu kedaulatan. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya keterlibatan badan keamanan internasional dalam menyelesaikan permasalahan gejolak politik di Kosovo sejak tahun 1999 hingga berakhirnya konstitusi Federasi Republik Sosialis Yugoslavia pada 27 April 1992.

D. Hubungan Politik Kosovo-Serbia dan Dilema Legitimasi Pemerintah Serbia Atas Wilayah Kosovo

Serbia merupakan negara berdaulat yang secara internasional diakui sebagai negara induk dari wilayah Kosovo. Dalam konstitusi negara Serbia, wilayah Kosovo merupakan bagian dari kedaulatan dan yuridiksi negaranya. Sehingga pemberlakuan tata perundang-undangan Serbia dalam wilayah Kosovo merupakan wewenang yang sah secara hukum. Konstitusi Serbia mengatur secara eksplisit mengenai wilayah Kosovo bahwa wilayah Kosovo merupakan sebuah wilayah yang memiliki otonomi khusus bersama

dengan Metohija. Bentuk otonomi khusus tersebut kemudian dibentuk provinsi otonomi Kosovo dan Metohija (Kosmet).

Permasalahan politik dan dilema legitimasi Serbia atas Kosovo mulai muncul sejak pecahnya perang Balkan tahun 1912. Peristiwa tersebut memberikan dampak kekalahan yang besar terhadap kelompok etnis Kosovo-Albania dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Kosovo. Kemenangan Serbia dalam perang Balkan berhasil mengubah demarkasi wilayah kedaulatan bangsa Balkan, termasuk wilayah Kosovo. Pada akhirnya wilayah Kosovo terintegrasi ke dalam wilayah kedaulatan Republik Serbia. Buntut dari kekalahan tersebut semakin diperparah dengan kerugian akibat Perang Dunia Pertama dimana pasukan Serbia secara brutal mengempur kelompok militan anti-Yugoslavia di Kosovo. Kurun waktu Januari-Februari 1919, pasukan Serbia telah membunuh sebanyak 6.040 rakyat sipil di Kosovo dan menghancurkan 3.873 pemukiman penduduk²⁶.

Keadaan kekalahan dan usaha stabilitasi keadaan politik di Balkan menekan negara di luar Yugoslavia untuk tunduk terhadap legitimasi negara sosialis tersebut. Kehendak rakyat Kosovo yang menginginkan untuk bergabung (iredentisme²⁷) ke dalam negara Albania sangat ditentang oleh pemerintah Yugoslavia. Hal ini justru direspons oleh Yugoslavia dengan

²⁶ Sabrina Petra Ramet, *Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević* (Oxford: Westview Press, 2002), hlm 311;

ditambahkan dengan buku: Noel Malcolm, *Kosovo: A Short History* (New York: University Press New York: 1998), hlm. 273

²⁷ Iredentisme adalah konsep politik dimana suatu negara berkehendak untuk mengasneksasi wilayah yang dikuasi oleh negara lain atas dasar persamaan etnis dan keterkaitan sejarah serta budaya. Iredentisme juga dipahami sebagai gerakan suatu kelompok yang ingin menggabungkan entitas kelompoknya ke dalam sebuah entitas negara lain agar tercapai cita-cita dan tujuan bangsa yang sama.

memberikan pilihan agar Albania masuk sebagai unit republik ketujuh dalam federasi sosialis Yugoslavia yang sekaligus membawahi wilayah Kosovo.²⁸ Namun, pilihan tersebut ditolak secara keras oleh Republik Albania. Hingga akhirnya, pada Desember 1944 muncul pemberontakan yang dipelopori oleh *Ballist*²⁹ untuk memberikan dukungan terhadap etnis Kosovo-Albania di wilayah Kosovo. Pemberontakan ini berujung pada tindakan gerilya kelompok Ballist di wilayah perbatasan Montenegro dan Kosovo guna memperkuat kedudukan etnis Kosovo-Albania di wilayah perbatasan.

Pembentukan provinsi otonomi bagi Kosovo tahun 1963 merupakan upaya Serbia dalam menegakkan wewenang pemerintah pusat Serbia atas wilayah Kosovo. Otonomi tersebut semakin diperluas ketika Serbia dipimpin oleh Slobodan Milošević dengan tujuan agar legitimasi pemerintah Serbia menjadi lebih kuat di wilayah Kosovo. Namun, tendensi kehendak rakyat Kosovo untuk mendapatkan kedudukan yang setara dengan republik di tingkat federal selalu ditolak oleh Serbia. Aspirasi rakyat tersebut berakibat pada tindakan pemerintah Serbia yang melakukan tindakan penekanan terhadap kelompok militan Kosovo-Albania. Pada kenyataannya justru tindakan Milošević tersebut memicu tindakan perang sipil yang lebih besar, termasuk tindakan perang Kosovo tahun 1998-1999.

²⁸ Branko Petranović, *Srbija u drugom svestkom ratu 1939-1945* (Belgrade: Vojnoizdavački I novinski centar, 1992), hlm. 251-252

²⁹ *Ballist* adalah kelompok bersenjata etnis Albania yang menolak konsep komunisme (anti-komunis) di wilayah Balkan. Kelompok ini juga memberikan dukungan terhadap minoritas etnis Albania yang bermukim di luar negara Republik Albania agar mendapatkan status kedudukan kedaulatan yang sama, khususnya di wilayah Kosovo

Milošević berpendapat bahwa serangan yang dilancarkan oleh pemerintah Serbia ke wilayah pemberontak etnis Kosovo-Albania adalah salah satu bentuk upaya menjaga kedaulatan Serbia. Sehingga, respons dunia internasional dalam peristiwa ini diabaikan oleh pemerintah Serbia. Milošević berdalih bahwa Serbia justru akan mendapatkan ancaman serius mengenai status kedaulatan dari kelompok militan Kosovo-Albania yang secara terus-menerus mendesak agar mendapatkan kemerdekaan atas Serbia. Walaupun pada akhirnya upaya tersebut selalu gagal dikarenakan legitimasi yang kuat dari pemerintah Serbia atas wilayah Kosovo.

Status provinsi otonomi Kosovo yang telah disandang beberapa tahun sejak berdirinya kerajaan Yugoslavia menjadi momentum bangkitnya perjuangan kedaulatan Kosovo di federasi republik sosialis. Namun ini menjadi semakin berkurang ketika diterapkannya kebijakan unifikasi oleh pemerintah pusat Serbia. Usaha ini menghasilkan gejolak politik yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Kosovo. Hal ini sekaligus berimbas pada terjadinya fluktuasi hubungan politik antara entitas pemerintah Serbia dengan pemerintahan lokal di Kosovo. Kebijakan unifikasi yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah Serbia merupakan sebuah upaya dalam menanggulangi gerakan separatisme etnis Kosovo-Albania guna menuntut kebebasan dan kemerdekaan dari Serbia dan Yugoslavia.

Kebijakan unifikasi oleh pemerintah Serbia menghasilkan gejolak politik di wilayah internal Kosovo. Kebijakan yang berhasil disahkan oleh parlemen Serbia dalam kurun waktu 1990-1992 menghasilkan beberapa

undang-undang, dekrit dan dua program penting yang sangat signifikan, yakni: *the Orwellian Programme for Peace, Liberty, Equality, Democracy and Prosperity* (PPLEDP) Maret 1990 dan *the Development Programme to Stop Emigration and for the Return of Serbs and Montenegrins* Juli 1992. Isi kebijakan tersebut diantaranya³⁰:

- Memindahkan tanggungjawab untuk urusan kebijakan internal Kosovo kepada Kementerian Dalam Negeri Serbia sekaligus menghapuskan angkatan bersenjata Kosovo dan Polisi Kosovo (pasca kejatuhan era Rankovic);
- Menghapuskan sistem konstitusi dan yudisial Kosovo sekaligus mengintegrasikan Kosovo ke dalam sistem pemerintahan di bawah Republik Serbia;
- Mengawasi arus informasi dan media yang ada di Kosovo langsung oleh pemerintah pusat Serbia;
- Menghilangkan dan menghapuskan beberapa tata hukum dan perundangan dalam sektor pendidikan yang selama ini dapat diatur oleh Kosovo, menjadi diatur secara resmi oleh pemerintah Serbia dengan hukum yang ketat;
- Membentuk sistem distrik (*municipalities*) yang langsung dikontrol dan dikelola oleh pemerintah Serbia;

³⁰ Howard Clarck, *Civil Resistance in Kosovo* (London: Pluto Press, 2000), hlm. 71-72

- Membentuk instansi penjamin hukum dan tata perundang-undangan Serbia di wilayah Kosovo guna menanggulangi demonstrasi akibat desakan etnis Kosovo-Albania;
- Mengalihkan seluruh aset pemerintah lokal Kosovo menjadi aset negara Republik Serbia. Sehingga berakibat pada banyaknya perusahaan yang diakuisisi oleh pemerintah Serbia secara sepihak guna menekan tindakan separatisme di Kosovo;
- Memberikan bantuan dana dan lahan untuk etnis Kosovo Serbia dan etnis Montenegro guna mendiami dan menetap di wilayah Kosovo. Hal ini dilakukan untuk mengusangi dan memecah konsentrasi masa pendukung separatisme atas Serbia; serta
- Menjanjikan program investasi dari pemerintah pusat untuk membangun sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan yang ada di wilayah Kosovo pasca terjadinya perang Kosovo tahun 1990.

Program dan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintahan Serbia dalam menegakkan legitimasi dan yuridiksi pemerintah Republik Serbia di wilayah Kosovo. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi gejolak politik yang mungkin terjadi mengenai isu kedaulatan maupun otonomi yang dihapuskan secara sepihak oleh Milošević. Kebijakan ini secara tidak langsung juga merupakan upaya pemerintah Serbia dalam memperkuat legitimasi dan yuridiksinya dengan mengubah proporsi penduduk Kosovo yang didominasi oleh etnis Kosovo-Albania, menjadi seimbang dengan etnis Kosovo-Serbia maupun etnis Montenegro.

Pada perkembangannya legitimasi pemerintahan Serbia berhasil menekan eskalasi tuntutan rakyat Kosovo dalam menuntut kedaulatan sejak tahun 1992 hingga tahun 2004. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan penekanan secara keras oleh pemerintah Serbia dalam hal membasmi usaha kemerdekaan Kosovo atas Serbia yang mengakibatkan kekerasan terhadap etnis Kosovo-Albania.³¹ Kemunculan berbagai kebijakan yang dapat menekan tendensi gejolak politik di Kosovo mengakibatkan munculnya era perdamaian dan stabilitas politik di Kosovo sejak kebijakan parlemen Serbia dikeluarkan pada kurun waktu 1990-1992. Namun, pada akhirnya muncul kembali permasalahan mengenai legitimasi dan kedudukan yang sah pemerintahan Serbia atas wilayah Kosovo³², seiring dengan munculnya gerakan separatisme yang dipelopori oleh Dr Ibrahim Rugova. Melalui partai Liga Demokrasi Kosovo secara masif sejak tahun 2000 stigma menuntut kemerdekaan dan kedaulatan Kosovo atas Serbia meningkat kembali³³. Hal ini yang pada akhirnya memunculkan *Kosovo Question* dalam hal kedaulatan dan legalitas yuridiksi pemerintahan Serbia di Kosovo.³⁴

³¹ Kosova Information Center, *Serbian Colonization and Ethnic Cleansing of Kosova: Documents and Evidence* (Prishtina: Kosova Information Center Press 1993), hlm. 98

³² Europe Western Balkans, "Thaçi: I hope that the issue of CSM will be resolved early in 2017", diakses dari <https://europeanwesternbalkans.com/2016/12/30/thaci-i-hope-that-the-issue-of-csm-will-be-resolved-early-in-2017/>, pada Rabu, 08 Maret 2017 pukul 12.00 WIB

³³ The Economist, "Kosovo Independence", diakses dari <http://www.economist.com/node/9278316>, pada Rabu, 08 Maret 2017 pukul 12.00 WIB

³⁴ New York Times, "Essay: The Kosovo Dilemma", diakses dari <http://www.nytimes.com/1998/06/18/opinion/essay-the-kosovo-dilemma.html>, pada Rabu, 08 Maret 2017 pukul 12.00 WIB;

ditambahkan dengan artikel: The Nation, "The Kosovo Dilemma the European Union needs to get Serbia focused on the future", diakses dari

E. Proses Entitas dalam Menempuh Kemerdekaan

Kedaulatan merupakan hal yang mendasar bagi sebuah negara guna mendapatkan kedudukan yang sah atas suatu pemerintahan sebuah negara. Sesuai yang termaktub dalam Konvensi Montevideo meliputi beberapa aspek, yakni: *pertama*, terdapatnya penduduk permanen yang mendiami wilayah tersebut; *kedua*, wilayah atau teritori yang jelas; *ketiga*, terciptanya pemerintahan yang berdaulat; dan *keempat*, memiliki kapasitas untuk membangun hubungan internasional dan menggalang pengakuan atau dukungan internasional dengan negara lain.³⁵ Sehingga menjadi hal yang mendasar bahwa isu kedaulatan adalah landasan sebuah entitas untuk mendapatkan status sebagai sebuah negara yang berdeka dan berdaulat.

Sejarah kemerdekaan dapat ditelusuri dari proses terbentuknya sebuah entitas untuk mendapatkan status kedaulatan. Sejatinya, kemerdekaan dikenal sebagai sebuah proses dimana sebuah entitas berhasil lepas dari entitas negara sebelumnya. Sehingga entitas tersebut menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan memiliki pemerintahan yang sah atas rakyat dan wilayahnya. Kewenangan sebuah negara berdaulat dalam

<https://www.thenation.com/article/kosovo-dilemma/>, pada Rabu, 08 Maret 2017 pukul 12.00 WIB

³⁵ Organization of American States, "Convention on Rights and Duties of States", diakses dari <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB; ditambahkan dengan buku: Hersch Lauterpacht, *Recognition in International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 419; ditambahkan dengan artikel: United Nations Treaty Centre, "UNTC: Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of America States", diakses dari <http://www.treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280166aef>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

menjaga keamanan negara menjadi syarat sebuah negara dapat menjaga keberlangsungan negaranya.

Kemerdekaan dalam sejarah dikenal dengan berbagai proses. Proses merupakan suatu upaya dalam mencapai tujuan maupun kepentingan tertentu bagi individu maupun kelompok. Sebuah negara didirikan merupakan dasar untuk pemenuhan atas dasar hakikat bernegara dan berbangsa. Hal ini merupakan upaya sebuah entitas dalam mencapai kedaulatan yang hakiki terhadap pemerintahannya, baik wilayah maupun urusan hukum dan politik yang terdapat didalamnya.

Proses kemerdekaan dikenal dengan beberapa cara alternative yang dapat dicapai. Dalam catata sejarah, kemerdekaan yang bersumbu pada upaya membentuk suatu negara-bangsa secara modern sejak dideklarasikannya Perjanjian Westphalia tahun 1648 menjadi tonggak sejarah baru dalam perjuangan kemerdekaan sebuah entitas. Negara dapat dicapai dengan beberapa cara, yakni: melalui perjuangan ataupun melalui sebuah pemberian. Pada hakikatnya, sebuah kemerdekaan merupakan upaya melepaskan sebuah entitas dari belenggu entitas yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, kemunculan usaha-usaha memperjuangkan kemerdekaan di era pasca Perang Dunia Kedua merupakan tonggak sejarah dalam melepaskan belenggu kolonialisme.³⁶

³⁶ Surya Prakash Sharma, *Territorial Acquisition, Disputes and International Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), hlm. 35-37

Dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional, kedaulatan dikenal sebagai sebuah proses lepasnya sebuah identitas entitas yang lama menjadi sebuah entitas yang baru. Hal ini kemudian memunculkan adanya konsep kemerdekaan yang dianut oleh sebagian besar negara-bangsa di era modern. Kedaulatan tentu menjadi syarat sah sebuah negara-bangsa modern berdiri, hal ini diperkuat dengan hasil kesepakatan Montevideo (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*) yang disahkan pada Konferensi Ketujuh Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada tanggal 26 Desember 1933.³⁷

Kemerdekaan (kedaulatan) diperoleh dari berbagai proses guna memperluas wilayah dari territorial/wilayah sebuah entitas, antara lain dengan: akresi (*accretion*), sesion (*cession*), penaklukan (*conquest*), preskripsi (*prescription*), dan okupasi secara efektif (*effective occupation*).³⁸ Empat proses tersebut yang akan mendasari bahwa kemerdekaan dapat dicapai dari sebuah entitas yang sudah ada untuk membentuk sebuah entitas yang baru. Akresi (*accretion*) adalah sebuah proses alamiah bahwa wilayah negara bertambah maupun berkurang dengan proses geografis, dimana proses ini tidak dapat dicampurtangani oleh keberadaan sebuah entitas untuk secara sengaja membentuk sebuah wilayah kedaulatan. Sesion (*cession*) adalah pemberian sebuah wilayah, kekuatan tertentu kepada pihak/entitas lainnya. Proses session (*cession*) menjadi sah

³⁷ Organization of American States, "Convention on Rights and Duties of States", diakses dari <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-40.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

³⁸ Surya Prakash Sharma, *Territorial Acquisition, Disputes and International Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1997), hlm. 35-37

dengan dilandasi hukum, perjanjian dan statuta yang sah antar pihak yang menyepakati.

Penaklukan (*conquest*) merupakan bentuk baru yang dikenal dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional sehingga mengakibatkan adanya tindakan kolonialisme sejak terjadinya ekspansi bangsa Eropa keseluruhan dunia (pasca pembentukan Perjanjian Westphalia 1648). Hal ini mendasari bentuk kolonialisme sebuah negeri jajahan atas negara induk, dimana seluruh hukum dan tata perundang-undangan negara induk dapat diberlakukan secara paksa di wilayah yang berhasil ditaklukan. Sehingga, dengan kemunculan bentuk penaklukan (*conquest*) memberikan dampak terhadap berkembangnya disiplin ilmu Hubungan Internasional mengenai isu kemerdekaan.³⁹ Dampak lain terhadap munculnya hak menaklukan adalah diperbolehkannya untuk melakukan agresi terhadap wilayah asing guna memperoleh perluasan wilayah kedaulatan sebuah negara-bangsa di era kolonialisme.

Preskripsi (*prescription*) merupakan upaya transfer kedaulatan secara damai sebuah entitas negara-bangsa berdaulat kepada negara-bangsa yang baru. Hal ini merupakan wujud dari transfer yang diberikan secara bertahap dengan cara penyerahan kedaulatan dan pengakuan secara sah. Preskripsi menjadi fenomena baru dalam menanggulangi kerugian akibat

³⁹ Sharon Korman, *The Right of Conquest: The Acquisition of Territory by Force in International Law and Practice* (London: Oxford University Press, 1996), hlm. 127-128; ditambahkan dengan artikel: *Definition of Aggression on General Assembly Resolution 3314 (XXIX)* disahkan pada tanggal 14 Desember 1974 ditulis oleh Elizabeth Wilmshurst

dari perjuangan sebuah kemerdekaan melalui cara-cara kekerasan.⁴⁰ Sebagai contoh adalah bubarnya Imperium Britania Raya, dengan melepas banyak negara baru menjadi negara-bangsa berdaulat pada kurun waktu tahun 1960-2000. Fenomena sebuah entitas mencapai kemerdekaan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan menjadi hal yang baru bagi disiplin ilmu Hubungan Internasional di era ini. Sehingga, cara lama dengan masih menggunakan proses okupasi dalam mendapatkan wilayah, menjadi pemicu entitas baru untuk menuntut sebuah kemerdekaan dari negara-bangsa induknya.

Okupasi secara efektif (*effective occupation*), merupakan timbal balik dunia ketiga (*third world*) dalam memberikan gejolak terhadap negara induk di era kolonialisme. Era kolonialisme memberikan dampak yang merugikan secara materiil maupun imateriil terhadap negara jajahannya. Sehingga tuntutan untuk mendapatkan hak secara manusiawi dari negeri jajahan kepada negara induk mulai diberlakukan, inilah yang menjadi cikal bakal perjuangan proses kemerdekaan sebuah bangsa di era modern. Perjuangan kemerdekaan yang muncul akibat proses okupasi secara efektif (*effective occupation*) menjadikan perjuangan bangsa terjajah secara keras memperjuangkan hak-hak sipil mereka, yang kemudian berujung pada penuntutan atas kemerdekaan.⁴¹

⁴⁰ Randall Lesaffer, *Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription* (Tilburg: European Journal International Law 16 volume 1, 2005), hlm. 25-28

⁴¹ Eyal Benvenisti, *The International Law of Occupation* (New Jersey: Princeton University Press, 2004), hlm. 32

Tuntutan kemerdekaan yang muncul dari akibat okupasi secara efektif (*effective occupation*), ini memiliki kelemahan yang sangat signifikan. Apabila sebuah negara induk tidak dapat menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat negara jajahan, maka perjuangan tuntutan negara jajahan untuk menjadi berdaulat menjadi semakin tinggi. Gagalnya negara induk untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat di negara jajahan dan justru memberikan beban secara moril terhadap negara jajahan, akan memberikan dampak semakin meningkatnya usaha kemerdekaan sebuah negara. Inilah yang menjadi dasar banyaknya perjuangan usaha kemerdekaan negara-negara baru yang muncul pasca era kolonialisme, untuk lepas dari belenggu kekuasaan yang negara induk.